

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial-ekonomi, sikap-sikap masyarakat, dan institusi- institusi nasional, disamping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Menurut Tadaro, pembangunan secara luas dapat didefinisikan sebagai proses perbaikan dari suatu masyarakat yang berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Pada awal ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian di revisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 yang menegaskan bahwa daerah-daerah tidak perlu

---

<sup>1</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 183.

<sup>2</sup> Meuti Irma Damayanti, *Skripsi Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009-2012*, (Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

menunggu petunjuk dan aturan-aturan dari pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>3</sup>

Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga di daerah. Tujuan diberlakukannya desentralisasi adalah yang pertama, tujuan politik yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik ditingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas nasional. Yang kedua, tujuan ekonomis yang dimaksud untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Menurut Todaro (2000), tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk memberikan peluang dan kebebasan (*freedom*), meliputi peluang dan kebebasan memenuhi kebutuhan akan barang dan pekerjaan, peluang dan

---

<sup>3</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), 45.

<sup>4</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, 44.

<sup>5</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, 86-87.

kebebasan memilih dan menentukan kehidupannya (*make choices and influence one's life*), termasuk peluang dan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau disparitas.<sup>6</sup> Berikut adalah tabel indeks pembangunan manusia di pulau Jawa.

**Tabel. 1.1**  
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PULAU JAWA**  
**TAHUN 2010-2017**

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI JAKARTA	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.6	80.06
JAWA BARAT	66.15	66.67	67.32	68.25	68.8	69.5	70.05	70.69
JAWA TENGAH	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98	70.52
DI YOGYAKARTA	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38	78.89
JAWA TIMUR	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74	70.27
BANTEN	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42
INDONESIA	66.53	67.09	67.7	68.31	68.9	69.55	70.18	70.81

*Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)*

Berdasarkan data di atas, indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten relatif stabil dan selalu mengalami peningkatan sejak menjadi daerah otonom. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya menjadi bagian dari daerah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan adanya tingkat pengangguran

<sup>6</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, 183.

terbuka yang tinggi di Provinsi Banten. Berikut adalah data tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun 2012-2016**

Provinsi	2012		2013		2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
DKI Jakarta	10.60	9.67	9.64	8.63	9.84	8.47	8.36	7.23	5.77	6.12
Jawa Barat	9.84	9.08	8.88	9.16	8.66	8.45	8.40	8.72	8.57	8.89
Jawa Tengah	5.90	5.61	5.53	6.01	5.45	5.68	5.31	4.99	4.20	4.63
DI Yogyakarta	3.98	3.90	3.75	3.24	2.16	3.33	4.07	4.07	2.81	2.72
Jawa Timur	4.16	4.11	3.97	4.30	4.02	4.19	4.31	4.47	4.14	4.21
Banten	10.68	9.94	9.77	9.54	9.87	9.07	8.58	9.55	7.95	8.92
<b>Indonesia</b>	<b>6.37</b>	<b>6.13</b>	<b>5.88</b>	<b>6.17</b>	<b>5.70</b>	<b>5.94</b>	<b>5.81</b>	<b>6.18</b>	<b>5.50</b>	<b>5.61</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah)*

Berdasarkan data di atas, tingkat pengangguran terbuka di provinsi Banten adalah tertinggi di Pulau Jawa. Hal ini berbanding terbalik dengan adanya angka indeks pembangunan manusia yang setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan rendahnya penyerapan angka tenaga kerja dan terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain- lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan

penyelenggaraan pemerintah di daerah.<sup>7</sup> Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah.

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.<sup>8</sup> Kebijakan fiskal terwujud dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Belanja Daerah dalam APBD ditunjukkan dengan belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin berkaitan dengan belanja yang sifatnya tetap dan untuk menjalankan roda pemerintahan secara normal, termasuk diantaranya untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Sedangkan belanja pembangunan merupakan komponen anggaran yang ditujukan untuk pembangunan tertentu, misalnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, jembatan, dan sebagainya.

Keaktifan pemerintah dalam perekonomian daerah memiliki dampak yang besar terhadap daerah tersebut, seiring dengan adanya kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun membuat daerah satu dengan yang lainnya mengalami perubahan yang lebih baik. Besar kecilnya kegiatan pemerintah

---

<sup>7</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 169.

<sup>8</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Serang: Kopsyah Baraka, 2013), 175.

menjadi salah satu indikator dari besar kecilnya dari pengeluaran pemerintah daerah.

Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, Provinsi Banten mempunyai kemungkinan sangat besar untuk aktivitas investasi khususnya penanaman modal asing (PMA). Karena, banyak tersedia bahan mentah dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, sektor industri dan potensi daerah yang dijadikan objek wisata.

Namun, penanaman modal asing merupakan dana pihak ke tiga yang berasal dari investor swasta. Pemerintah daerah hanya menjalankan dan memberikan regulasi untuk investasi asing yang masuk di Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut, sejauh mana penerimaan, pengeluaran hingga investasi yang ada di Provinsi Banten sudah dialokasikan tepat untuk kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini di ukur oleh indeks pembangunan manusia. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN INVESTASI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2016.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Indeks pembangunan manusia berbanding terbalik dengan adanya tingkat pengangguran terbuka yang tinggi.
2. Penerimaan daerah belum optimal untuk lapangan pekerjaan.
3. Distribusi pengeluaran pemerintah untuk masyarakat belum optimal.
4. Potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah belum dikelola dengan baik

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2012-2016?

4. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2012-2016?

#### **D. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup objek penelitian, maka penelitian ini peneliti membatasi hanya dilakukan di Provinsi Banten berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diperoleh dari Kabupaten Kota Provinsi Banten dengan menggunakan data *cross section* dari tahun 2012 sampai 2016. PAD yang digunakan adalah realisasi PAD dari masing-masing kabupaten kota, pengeluaran pemerintah yang digunakan adalah belanja daerah yang terdiri dari realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung, investasi yang dimaksud adalah realisasi penanaman modal asing (PMA) dan indeks pembangunan manusia masing- masing kabupaten kota di provinsi banten.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.



3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2012-2016.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

##### 1. Bagi Penulis

Dapat memperdalam pengetahuan dan ilmu serta wawasan mengenai Pengaruh PAD, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi yang bergerak fluktuatif dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

##### 2. Bagi Lembaga dan Masyarakat

Penulis berharap dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang lembaga yang dituju dan dapat memberikan dampak yang baik bagi perekonomian di Provinsi Banten.

### 3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi civitas akademika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **G. Kerangka Pemikiran**

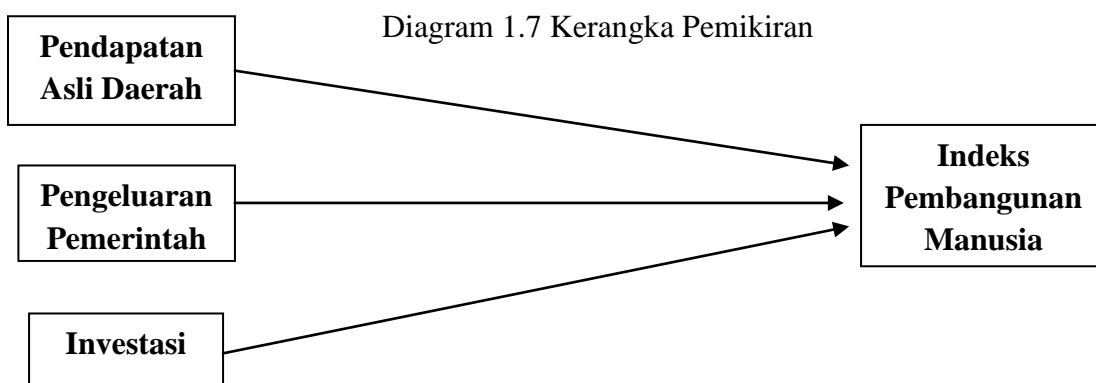
Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, diagram atau bahkan gabungan keduanya.

Indeks pembangunan manusia tidak lepas kaitannya dengan seberapa tepatnya pendapatan hingga pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membangun sumber daya manusia yang produktif. Yang mana, produktivitas selalu bergandengan dengan tingkat perolehan pendapatan. Sehingga, dengan tingkat pendapatan yang diperoleh bisa menekan jumlah penduduk miskin daerah tersebut. Indeks pembangunan manusia juga merupakan dampak dari adanya ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan selain sumber penerimaan daerah lainnya. Berdasarkan pasal 1 butir 17 Undang- undnag No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan perundang- undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Pengeluaran pemerintah salah satu kegiatan perekonomian yang ada di suatu daerah. Bahwa peran atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan dalam menjalankan roda perekonomian daerah. Yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan.

Berdasarkan deskripsi teori di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



---

<sup>9</sup> Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 Butir 17, *Tentang Perimbangan Keuangan Anantara Pemerintah Pusat dan Daerah*

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu bab I. Pendahuluan, bab II. Landasan Teori, bab III. Metode penelitian, bab IV. Pembahasan hasil penulisan, dan bab V. Kesimpulan dan saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut :

**BAB Ke-Satu : Pendahuluan** bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB Ke-Dua : Landasan Teori** bab ini membahas tentang kajian pustaka, meliputi pengertian pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah, investasi dan indeks pembangunan manusia.

**BAB Ke-Tiga : Metode penelitian** bab ini menguraikan secara rinci mengenai objek penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

**BAB Ke-Empat : Pembahasan hasil penelitian** bab ini membahas uraian hasil penulisan berupa temuan- temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan di sertai pembahasan analisis dan terpadu.

**BAB Ke-Lima : Kesimpulan dan saran** bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang di teliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.